



LAPORAN KEUANGAN

Audited 2025

Loka Kawasan Konservasi Perairan
Nasional Pekanbaru



20 25



Bagus Wak
Bersih, Amanah, Giat Untuk
Sumberdaya Kawasan Konservasi



LKKPN
PEKANBARU

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**LOKA KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN
NASIONAL PEKANBARU**

Catatan Atas Laporan Keuangan
Audited
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan *Audited* tahun 2025 yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025.

Penyusunan Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas /pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru. Di samping itu, Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).se

Pekanbaru, 29 April 2026
Kepala Loka Pengelolaan Kelautan
Pekanbaru,

Rahmad Hidayat, S.Hut, M.Si
NIP. 19790927 200912 1002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan <i>Audited</i> tahun 2025	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
SATKER LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU
Jl. Budiluhur, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, 29 April 2026
Kepala Loka Pengelolaan Kelautan
Pekanbaru,

Rahmad Hidayat, S.Hut, M.Si
NIP. 19790927 200912 1002

Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp235.846.981 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp235.846.981 atau mencapai 789,05 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp29.890.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp21.039.243.831 atau mencapai 80,63 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp26.092.245.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp21.950.573.476 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.619.984.000; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp17.816.982.681 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.513.606.795.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.881.867 dan Rp21.946.691.609,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp229.286.850 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp14.921.692.668 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-14.692.405.818, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa

masing-masing sebesar Rp4.670.771 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-14.687.735.047,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp15.831.924.324, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-14.687.735.047 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -894.518 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 20.803.396.850 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp21.946.691.609,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN 2025

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual .

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SATKER LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
Belanja Pegawai	B.2.1	6.056.643.000	5.979.910.618	98,73	5.371.699.184
Belanja Barang	B.2.2	13.967.154.000	10.132.652.494	72,55	8.774.540.162
Belanja Modal	B.2.3	6.068.448.000	4.926.680.719	81,19	3.299.047.320
JUMLAH BELANJA		26.092.245.000	21.039.243.831	80,63	17.445.286.666

Pekanbaru, 29 April 2026
Kepala Loka Pengelolaan Kelautan
Pekanbaru

Rahmad Hidayat, S.Hut, M.Si
NIP. 19790927 200912 1 002

Catatan atas Laporan Keuangan Audited tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Audited tahun 2025

II. NERACA

SATKER LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU

NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	2.619.190.000	-
Persediaan	C.2	794.000	829.700
Jumlah Aset Lancar		2.619.984.000	829.700
ASET TETAP			
Tanah	C.3	5.587.783.737	-
Peralatan dan Mesin	C.4	12.281.990.327	-
Gedung dan Bangunan	C.5	8.267.854.943	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.6	2.966.112.339	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(11.286.758.665)	-
Jumlah Aset Tetap		17.816.982.681	-
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.8	2.721.102.691	302.530.519.300
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(1.207.495.896)	(30.230.814.570)
Jumlah Aset Lainnya		1.513.606.795	272.299.704.730
JUMLAH ASET		21.950.573.476	272.300.534.430
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	3.881.867	320.993.284
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.881.867	320.993.284
JUMLAH KEWAJIBAN		3.881.867	320.993.284
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	21.946.691.609	1.100.908.775.517
JUMLAH EKUTAS		21.946.691.609	1.100.908.775.517
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		21.950.573.476	1.101.229.768.801

Pekanbaru, 29 April 2026
Kepala Loka Pengelolaan Kelautan
Pekanbaru

Rahmad Hidayat, S.Hut, M.Si
NIP. 19790927 200912 1 002

Catatan atas Laporan Keuangan Audited tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Audited tahun 2025

III. LAPORAN OPERASIONAL

SATKER LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	229.286.850	-
Jumlah Pendapatan		229.286.850	-
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	5.940.852.002	-
Beban Persediaan	D.3	42.189.223	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	5.765.670.842	-
Beban Pemeliharaan	D.5	492.343.104	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.204.347.706	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.476.289.791	-
Jumlah Beban		14.921.692.668	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(14.692.405.818)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.8	(1.889.360)	(677.149.864)
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.9	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	6.560.131	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		4.670.771	(677.149.864)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(14.687.735.047)	(677.149.864)
Pos Luar Biasa	D.11		
SURPLUS/DEFISIT - LO		(14.687.735.047)	(677.149.864)

Pekanbaru, 29 April 2026
Kepala Loka Pengelolaan Kelautan
Pekanbaru

Rahmad Hidayat, S.Hut, M.Si
NIP. 19790927 200912 1 002

Catatan atas Laporan Keuangan Audited tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Audited tahun 2025

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SATKER LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	15.831.924.324	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(14.687.735.047)	(677.149.864)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(894.518)	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.5	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.4.6	(894.518)	-
Jumlah		(894.518)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	20.803.396.850	-
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		6.114.767.285	(677.149.864)
EKUITAS AKHIR	E.6	21.946.691.609	(677.149.864)

Pekanbaru, 29 April 2026
Kepala Loka Pengelolaan Kelautan
Pekanbaru

Rahmad Hidayat, S.Hut, M.Si
NIP. 19790927 200912 1 002

Catatan atas Laporan Keuangan Audited tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Audited tahun 2025

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru didirikan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk Entitas berkedudukan di Jalan Budiluhur Kelurahan Mentangor Kecamatan Kulim Pekanbaru.

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru mempunyai tugas dan fungsi mengelola kawasan konservasi yang efektif dan penyajian laporan keuangan yang baik dan handal. Melalui peran tersebut diharapkan laporan K/L dapat ditingkatkan kualitas yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru berkomitmen dengan visi "mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju laporan keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas"

Untuk mewujudkan visi tersebut LKKPN Pekanbaru melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplentasikan.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Audited tahun 2025

Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker LKKPN Pekanbaru. Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 ini

*Audited
tahun 2025*

dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 214/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta PMK Nomor 183/PMK.05/2020 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 . Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 . Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan *Audited* tahun 2025 yang merupakan entitas pelaporan dari Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan PeLaporan Keuangan *Audited* tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 .

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 .

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan

publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp310.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola

Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto

yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

1. Revisi I merupakan revisi anggaran dalam hal pemutakhiran KPA (pemutakhiran data POK) guna meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja sesuai surat usulan revisi nomor: B.102/LKKPN/RC.420/I/2025 tanggal 3 Januari 2025.
2. Revisi II merupakan revisi anggaran dalam hal pemutakhiran KPA (pemutakhiran data POK) guna meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja sesuai surat usulan revisi nomor: B.209/LKKPN/RC.420/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.
3. Revisi II merupakan revisi anggaran dalam hal pemutakhiran KPA (pemutakhiran data POK) guna meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja sesuai surat usulan revisi nomor: B.282/LKKPN/RC.420/II/2025 tanggal 14 Februari 2025.
4. Revisi IV merupakan revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi, pencantuman anggaran blokir efisiensi belanja Kementerian/Lembaga. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, volume keluaran (*output*) tetap sesuai surat usulan revisi nomor: :247 | DJPKRL I RC.420/ I/ 2025 tanggal 18 Februari 2025.
5. Revisi V merupakan revisi anggaran dengan usulan revisi anggaran pada halaman III DIPA dengan pertimbangan antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja dengan volume RO tetap sesuai surat usulan revisi halaman III DIPA nomor B.317/LKKPN/RC.420/II/2025 tanggal 24 Februari 2025.
6. Revisi VI merupakan usulan revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi, penghapusan catatan halaman IV.A DIPA (relaksasi blokir efisiensi belanja K/L) antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mengikatkan efektivitas dan kualitas belanja

dengan volume RO tetap sesuai surat usulan revisi nomor : B.16/LKKPN/RC.420/III/2024 tanggal 24 Maret 2024.

7. Revisi VII merupakan usulan revisi halaman III DIPA antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan dan volume keluaran (Output) berubah sesuai surat usulan B.478/LKKPN/RC.420/IV/2025 tanggal 16 April 2025.
8. Revisi VIII merupakan revisi anggaran pemutakhiran KPA yakni pemuktahiran data POK dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja dengan volume RO tetap sesuai surat usulan nomor : B.502/LKKPN/RC.420/IV/2025 tanggal 23 April 2025.
9. Revisi IX revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi. Pembukaan blokir kode 2 dalam halaman IV.A DIPA, antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan dnegan volume keluaran (*output*) tetap sesuai surat usulan revisi anggaran nomor : B.339/LKKPN/RC.420/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025.
10. Revisi X merupakan revisi anggaran pemutakhiran KPA, antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja dengan volume RO tetap sesuai surat usulan revisi nomor B.815/LKKPN/RC.420/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025.
11. Revisi XI merupakan revisi usulan anggaran dengan revisi halaman III DIPA yakni antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja dengan volume RO tetap sesuai surat usulan revisi anggaran nomor B.844/LKKPN/RC.420/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025.
12. Revisi XII merupakan usulan revisi anggaran dengan pemutakhiran KPA yakni antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja dengan volume RO tetap sesuai surat usulan revisi anggaran nomor B.1260/LKKPN/RC.420/IX/2025 tanggal 31 Desember 2025.
13. Revisi XIII merupakan usulan revisi anggaran antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mengingkatkan efektivitas dan kualitas belanja dengan volumen RO tetap sesuai surat usulan nomor: B.1288/LKKPN/RC.420/X/2025 tanggal 6 Oktober 2025.

14. Revisi XIV merupakan revisi anggaran pembukaan blokir kode 2 dalam halaman IV.A DIPA, peningkatan penggunaan dana PNBP, penambahan anggaran akun 526 (belanja barang untuk diserahkan kepada masyarkat/pemerintah daerah) dan pergeseran anggaran antar jenis belanja akun 52 ke akun 53. Revisi ini mengantisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan dengan volume keluaran berubah sesuai surat usulan revisi nomor: B.1345/DJPK/RC.420/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025
15. Revisi XV merupakan revisi antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, meningkatkan dan kualitas belanja dengan volume RO tetap berdasarkan surat usulan revisi anggaran nomor: B.1449/LKKPN/RC.420/XI/2025 tanggal 10 November 2025.
16. Revisi XVI merupakan revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah dan revisi adiministrasi untuk antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan dengan volume keluaran (*output*) berubah sesuai surat usulan revisi nomor: B.1551/DJPK/RC.420/XI/2025 tanggal 12 November 2025.
17. Revisi XVII revisi pemutakhiran KPA untuk mengatisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja dengan volume RO tetap sesuai surat usulan nomor: B.1656/LKKPN/RC.420/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025.
- Posisi anggaran LKKPN Pekanbaru secara keseluruhan pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	29.890.000	29.890.000
Jumlah Pendapatan	29.890.000	29.890.000
Belanja		
Belanja Pegawai	6.455.000.000	6.056.643.000
Belanja Barang	8.193.764.000	13.967.154.000
Belanja Modal	1.350.382.000	6.068.448.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	15.999.146.000	26.092.245.000

Secara umum anggaran Dipa LKKPN Pekanbaru berjumlah Rp26,092,245,000,- bersumber dari Rupiah Murni (RM) senilai

Rp8,951,797,000,- dengan rincian belanja pegawai senilai Rp6,056,643,000,- dengan realisasi belanja pegawai sebesar Rp5,979,910,618,- . Belanja barang senilai Rp2,890,361,488,- dari pagu anggaran Rp2,895,154,000,- dan bersumber dari PNBPNP senilai Rp17,140,448,000,- sementara untuk anggaran bersumber dari PNBPNP realisasi belanja barang senilai Rp7,242,291,006,- dari pagu anggaran Rp11,072,000,000,- dan realisasi belanja modal senilai Rp4,926,680,719,- dari pagu belanja modal senilai Rp6,068,448,000,-.

Realisasi

Pendapatan

Rp235.846.981,

-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp235.846.981 atau mencapai 789,05 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp29.890.000. Pendapatan Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp235.846.981. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Peningkatan PNBPNP tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, peningkatan PNBPNP di tahun 2025 senilai Rp235,846,981,- dikarenakan pada tahun 2025 adanya peningkatan pendapatan dari Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) serta adanya Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122). Secara umum penerimaan per akun adalah :

1. Akun 425131 (pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan dengan nilai Rp4,324,968,- dan telah dirubah menjadi akun Pendaptan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151), pada tahun 2025 pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi senilai Rp3,866,850,-. sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : S-7/PB/BP.6/2025 tanggal 11 Maret 2025.

LKKPN Pekanbaru pada priode Januari 2025 sampai dengan Maret 2025 menggunakan akun 425131 (pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan), selanjutnya pada penerimaan bulan April menggunakan akun baru sesuai SE DJPB tersebut dengan akun 425252 sekaligus revisi terhadap potongan SPM yang sudah berlangsung selama priode Janauri – Maret 2025. Revisi SPM tersebut dilakukan pada bulan April 2025.

Nilai pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tulus mengalami banyak perubahan, secara detail sebagai berikut:

Pada bulan Januari 2025, nilai sewa rumah negara adalah senilai Rp180.957,- untuk setiap rumah, dengan mengacu kepada Surat Penunjukan Penghunian Rumah Negara nomor 11/LKKPN/I/2024 tanggal 2 Januari 2024. Perhitungan nilai sewa pada surat tersebut mengacu kepada nilai harga satuan tertinggi bangunan rumah negara tahun 2022 yang tercantum pada Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 896 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar di Kota Pekanbaru tahun 2022.

Pada bulan Februari 2025, nilai sewa rumah negara adalah senilai Rp169.948,- untuk setiap rumah, dengan mengacu kepada Surat Penunjukan Penghunian Rumah Negara nomor 7/KPB/2025 tanggal 2 Januari 2025. Perhitungan nilai sewa pada surat tersebut mengacu kepada nilai harga satuan tertinggi bangunan rumah negara yang tercantum pada Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 854 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar di Kota Pekanbaru tahun 2023.

Pada bulan Maret 2025, nilai sewa rumah negara adalah senilai Rp158.252,- untuk setiap rumah, dengan mengacu kepada Surat Penunjukan Penghunian Rumah Negara nomor 35/KPB/2025 tanggal 3 Februari 2025. Perhitungan nilai sewa pada surat tersebut mengacu kepada nilai harga satuan tertinggi bangunan rumah negara yang tercantum pada Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 979 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar di Kota Pekanbaru tahun 2025.

2. Akun 425629 (Pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya) mengalami kenaikan sebanyak 70.23% atau senilai Rp225,420,000,- dibandingkan tahun 2024. hal ini dikarenakan penerimaan akun 425629 adanya peningkatan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Taman Wisata Perairan yang dikelola oleh LKKPN Pekanbaru dan berlaku tarif normal.
3. Akun 425911 senilai Rp740.590,- bersumber dari pengembalian kelebihan bayar belanja pegawai berupa tunjangan kinerja

pegawai LKKPN Pekanbaru dengan rincian 4 (empat) orang pegawai dikarenakan cuti yang tidak terpotong tunjangan kinerjanya dan 5 (lima) orang pegawai yang terlambat namun belum dipotong tunjangan kinerjanya.

4. Akun 425122 (pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin) senilai Rp5,819,541,- yang merupakan penjualan dari penghapusan melalui mekanisme lelang inventaris kantor berdasarkan Risalah lelang nomor : 116/03.03/2025-01 tanggal 06 Mei 2025 dengan penetapan pemenang bernama Abdul Wahab Nasution, warga Pekanbaru, dengan nilai lelang Rp4.346.311. Terhadap hasil lelang tersebut telah dilakukan pengambilan barang lelang pada tanggal 7 Mei 2025, berdasarkan berita acara serah terima lelang barang milik negara nomor B.569/LKKPN/PL.430/V/2025 bertempat di kantor LKKPN Pekanbaru. Dengan telah dilakukannya serah terima barang, maka kemudian ditindaklanjuti dengan dikirimkannya surat permohonan penerbitan SK Penghapusan BMN ke Sekretaris Dirjen PK berdasarkan surat nomor B.627/LKKPN/PL.750/V/2025 tanggal 21 Mei 2025. Terhadap hal tersebut, telah terbit Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 844/KEPMEN-KP/PL.750/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang Penghapusan BMN (SK Penghapusan) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	29.890.000	235.846.981	789,05
Jumlah	29.890.000	235.846.981	789,05

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan (789,05%) dari target yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh adanya kunjungan wisatawan WNA pada Kawasan Konservasi Anambas. Perbandingan realisasi penerimaan pada priode laporan tahun 2025 dan tahun 2024 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	235.846.981	164.934.448	42,99
Jumlah	235.846.981	164.934.448	42,99

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp235,846,981,- dan Rp164,934,448,-. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 42,99% dari TA 2024, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.819.541	-	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	3.866.850	-	-
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	225.420.000	132.420.000	70,23
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.568.833	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	740.590	119.245	521,07
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	25.483.402	(100,00)
Jumlah	235.846.981	164.934.448	42,99

Kenaikan pendapatan ini bersumber dari pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin pada tahun 2025 senilai Rp5.819.541,- sementara pada tahun 2024 tidak ada. Selanjutnya terjadinya peningkatan pendaptan jasa kelautan dan perikanan lainnya senilai Rp225.420.000,- dari tahun 2024 dengan nilai Rp132.420.000,- atau sebesar 70,23%.

Realisasi
Belanja Negara
Rp21,039,243,8
31,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp21.039.243.831,- atau 80,63 % dari anggaran belanja sebesar Rp.26.092.245.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	6.056.643.000	5.979.910.618	98,73
Belanja Barang	13.967.154.000	10.132.652.494	72,55
Belanja Modal	6.068.448.000	4.926.680.719	81,19
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	26.092.245.000	21.039.243.831	80,63

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada grafik berikut:



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 20,60% Kenaikan realisasi belanja pegawai tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2025 adanya penambahan pegawai 2 orang an. Amalia Sekar Ayuningtyas dan Bagus Bagaskoro, penambahan pegawai PPPK yang aktif terhitung dari bulan Oktober 2025 serta penambahan tunjangan suami/istri PPPK, belanja tunjangan anak PPPK, belanja tunjangan umum PPPK. Selanjutnya pada belanja barang mengalami peningkatan senilai Rp10,132,652,494,- dikarenakan adanya penambahan anggaran PNBK pada bulan Oktober pada LKKPN Pekanbaru serta telah dibuka blokir anggaran LKKPN pada Triwulan IV, sehingga adanya peningkatan belanja modal pada Triwulan IV senilai Rp4,926,680,719,-. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	5.979.910.618	5.371.699.184	11,32
Belanja Barang	10.132.652.494	8.774.540.162	15,48
Belanja Modal	4.926.680.719	3.299.047.320	49,34
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	21.039.243.831	17.445.286.666	20,60

Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar (20.60%) dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja Pegawai
 - Kenaikan beban gaji di tahun 2025 senilai Rp5,979,910,618,- dan di tahun 2024 senilai Rp5,371,699,184,- dikarenakan adanya penambahan pegawai fungsional APJK Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (P3K) pada tahun 2025 sebanyak 11 orang, serta pegawai pindahan Loka RSDKP Bungus an. Ilham serta ada penambahan CASN sebanyak 2 (dua) orang an. Bagus Bagaskoro dan Amalia Sekar Ayuningtyas.
 - Nilai Belanja Gaji memiliki selisih antara LRA Rp5,979,910,618,- dengan nilai Beban di LO senilai Rp5,940,852,002,- selisih antara LRA dan LO senilai Rp39,058,616,- yang merupakan belanja akrual tahun 2024 yakni kekurangan tunjangan kinerja bulan Desember 2024 untuk 9 (sembilan) orang pegawai.
 - Ada pengembalian belanja pegawai senilai Rp1.110.635,- yang bersumber dari pengembalian belanja yang berasal dari potongan SPM bersumber dari pengembalian tunjangan umum bai pegawai JFT APJK pada pembayaran kekerungan gaji tunjangan jabatan JFT APJK bulan Januari – Februari 2025 dengan nilai Rp740.100,- pengembalian tunjangan umum pada kekurangan gaji THR JFT APJK Rp370.000,- dan pembulatan gaji PNS Rp635,-.
2. Kenaikan belanja Barang sebesar (15.48%), kenaikan belanja barang dikarenakan adanya penambahan anggaran pada LKKPN Pekanbaru yang bersumber dari anggaran PNBP.
3. Realisasi belanja modal TA 2025 mengalami kenaikan sebesar (49.34%) dikarenakan adanya penambahan anggaran PNBP pada triwulan IV tahun 2025.

Belanja Pegawai **B.2.1 Belanja Pegawai**

Rp5,979,910,61

8,-

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.979.910.618 dan Rp5.371.699.184. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 11,32 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Kenaikan beban gaji di *Audited* tahun 2025 senilai Rp5,979,910,618,- dan di tahun 2024 senilai Rp5,371,699,184,- dikarenakan adanya penambahan belanja tunjangan suami/istri pegawai fungsional APJK Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (P3K) pada tahun 2025 an. Siti Komariah. serta adanya penambahan tunjangan fungsional P3K yang berlaku mulai awal Januari 2025, serta adanya penambahan pegawai PPPK mulai Oktober 2025 sebanyak 10 orang.

Nilai Belanja Gaji memiliki selisih antara LRA Rp5,979,910,618,- dengan nilai Beban di LO senilai Rp5,940,852,002,- selisih antara LRA dan LO senilai Rp39,058,616,- yang merupakan belanja akrual tahun 2024 yakni kekurangan tunjangan kinerja bulan Desember 2024 untuk 9 (sembilan) orang pegawai.

Ada pengembalian belanja pegawai senilai Rp1.110.635,- yang bersumber dari belanja pembulatan gaji PNS (511119) senilai Rp635,- dan Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) senilai Rp1.110.000,- merupakan pengembalian tunjangan umum an. Siti Komariah dan Achmad Facruddin dikarenakan pengajuan gaji bulan Januari dan bulan februari menerima tunjangan umum, sementara pada bulan maret sudah keluar peraturan untuk pencairan tunjangan fungsional APJK yang berlaku mulai bulan Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.972.542.040	1.862.834.500	5,89
Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.033	29.364	(1,13)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	155.463.230	149.967.570	3,66
Belanja Tunj. Anak PNS	41.485.880	39.483.228	5,07
Belanja Tunj. Struktural PNS	12.600.000	12.600.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	213.100.000	188.160.000	13,25
Belanja Tunj. PPh PNS	11.665.051	10.602.607	10,02
Belanja Tunj. Beras PNS	113.192.460	110.295.660	2,63
Belanja Uang Makan PNS	257.649.000	217.560.000	18,43
Belanja Tunjangan Umum PNS	37.950.000	37.370.000	1,55
Belanja Uang Lembur	28.440.000	46.166.000	(38,40)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2.788.147.417	2.600.413.650	7,22
Belanja Gaji Pokok PPPK	124.348.000	38.443.200	223,46
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.316	830	299,52
Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.255.880	869.040	850,00
Belanja Uang Makan PPPK	25.033.000	5.920.000	322,85
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kiner	164.161.496	50.878.823	222,65
Belanja Uang Lembur PPPK	1.839.000	291.000	531,96
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	9.759.190	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8.100.000	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	5.981.021.253	5.371.885.472	11,34
Pengembalian Belanja Pegawai	1.110.635	186.288	496,19
Jumlah Belanja	5.979.910.618	5.371.699.184	11,32

Belanja Barang **B.2.2 Belanja Barang**

Rp10,132,652,494,-

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.132.652.494 dan Rp8.774.540.162. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 15,48% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Terjadi kenaikan belanja barang pada priode *Audited* / Tahunan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024, hal ini dikarenakan adanya penambahan anggaran yang bersumber dari PNBPN senilai Rp10,491,456,000,- yang meliputi dari belanja barang senilai Rp6,265,890,000,- dan belanja modal senilai Rp4,225,566,000,-.

selanjutnya ada selisih antara belanja di LRA dan Beban LO pada pelaporan LK priode *Audited* tahun 2025. Nilai pada LRA adalah Rp10,094.034.171,- sementara beban di LO sebesar Rp7.462.361.652,- terjadi selisih senilai Rp2.631.672.519,-. selisih tersebut dengan rincian belanja barang yang dibayar dimuka (prepaid) senilai Rp2.619.190.000,- untuk 11 (sebelas) wilayah kerja LPK Pekanbaru, dari 11 wilayah kerja tersebut 7 (tujuh) wilker memiliki masa sewa 3 (tiga) tahun, 2 (dua) wilker memiliki masa sewa 2 (dua) tahun dan 1 (satu) wilker memiliki masa sewa 1 (satu) tahun. Selanjutnya Rp8.947.319,- yang merupakan selsisih belanja akrual (belanja barang dan jasa berupa belanja langganan daya dan internet) pada tahun 2024 yang diakrualkan pada awal tahun 2025 senilai Rp12.829.186,- dan tahun 2025 yang diakrualkan pada awal tahun 2026 senilai Rp3.881.867,-.

Belanja barang persediaan pada LRA senilai Rp38.618.323,- sementara beban persediaan pada LO senilai Rp42.189.223,- terjadi selisih belanja persediaan antara LRA dan LO senilai (Rp3.570.900,-), selisih minus dikarenakan posisi beban lebih banyak dari pada nilai belanjanya. Hal ini disebabkan adanya penggunaan belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin (523123) senilai Rp3.535.200,- dan diakui beban persediaan, selanjutnya ada (Rp.35.700) yang merupakan selsish saldo awal barang konsumsi tahun 2025 senilai Rp829.700,- sehinga saldo akhir barang konsumsi di akhir tahun 2025 senilai Rp794.000,-. LO lebih besar dari LRA dengan artian bahwa stok persediaan lama terpakai.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024			
URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	342.714.510	619.023.532	(44,64)
Belanja Barang Non Operasional	561.642.504	1.384.019.167	(59,42)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	38.618.323	50.859.523	(24,07)
Belanja Jasa	7.489.451.147	3.210.965.188	133,25
Belanja Pemeliharaan	495.878.304	426.313.157	16,32
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.199.033.026	2.883.849.595	(58,42)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	-	199.510.000	(100,00)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	5.314.680	-	-
Jumlah Belanja Kotor	10.132.652.494	8.774.540.162	15,48

Belanja Modal
Rp4,926,680,71
9,-

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.926.680.719 dan Rp3.299.047.320. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 49,34% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Belanja modal Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan periode *Audited* tahun 2024, hal ini dikarenakan pada tahun 2025 adanya kegiatan belanja modal bangunan berupa paket interior kantor layanan pih dan sarana prasarana konflik buaya. secara rinci belanja modal gedung dan bangunan dan peralatan dan mesin di tahun 2025 sebagai berikut:

A. Belanja Modal Perlatan dan Mesin

1. Pembelian 2 unit kamera udara berdasarkan SP nomor EP-01K30NVADR427TJEZX963GWHKQ tanggal 19 Agustus 2025 dan BAST nomor 88/LKKPN/PPK.E-Purchasing/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025 senilai Rp140.326.200,-;
2. Pembelian 2 unit Battery Lithium-I (baterai untuk drone) berdasarkan SP nomor EP-01K5742ABX6T78E58R3BC250MG tanggal 16 September 2025 dan BAST nomor 101/LKKPN/PPK.E-Purchasing/IX/2025 tanggal 22 September 2025 senilai Rp7.328.220,-;
3. Pembelian 3 unit note book berdasarkan SP nomor EP-01K1ZAA2P5693148AGMCGAEDZZ tanggal 7 Agustus 2025 dan BAST nomor 86/LKKPN/PPK.E-Purchasing/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 senilai Rp52.558.500,-;
4. Pembelian 1 unit Ipad berdasarkan SPK nomor: EP-01K4VANRT2P2WNAMNK21YBBEAT tanggal 11 September 2025 senilai Rp12,748,350,- dan BAST nomor: 106/LKKPN/PPK.E-Purchasing/IX/2025;
5. Pembelian 3 mobil Hilux senilai Rp1,425,000,001,- sesuai SPK nomor: EP-01KAAQ47PWZVP1JJHDHJV04MRX, Tanggal 18 November 2025 dan BAST nomor: 531/LKKPN/PPK.E-Purchasing/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025;

6. Pembelian 2 unit mobil Innova senilai Rp,1,126,400,000,- sesuai SPK nomor: EP-01KAG501T6NCSX80RXV98MP0Z1, Tanggal 21 November 2025 dan BAST nomor: 533/LKKPN/PPK.E-Purchasing/XII/2025 tanggal 4 Desember 2026;
7. Pembelian 2 unit drone serta 6 unit baterai senilai Rp176,967,300,- sesuai SPK nomor: EP-01K9VGWY76AY01CDQDX81ZZ5F5 Tanggal 13 November 2025 dan BAST nomor: 448/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 22 November 2025;
8. Pembelian 2 unit hilyland, 2 unit pocket, 1 unit kamera fuji senilai Rp68,797,800,- sesuai SPK nomor: P-01KA664SCP6DB75XX0S5XFQ9WK, Tanggal 17 November 2025 dan BAST nomor: 449/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 22 November 2025;
9. Pembelian 6 unit AC senilai Rp35,964,000,- sesuai SPK nomor: EP-01KAJMYSRAE5QZTRHTGNK69YW2, Tanggal 21 November 2025 dan BAST nomor: 522/LKKPN/PPK.E-Purchasing/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025
10. Pembelian 20 unit laptop senilai Rp538,549,998,- sesuai SPK nomor: EP-01KAFREC530N8S9633RD0VBFYZ, Tanggal 20 November 2025 dan BAST nomor: 529/LKKPN/PPK.PL/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025; dan pembelian lainnya sebagaimana terlampir dalam laporan keuangan ini.

B. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Paket interior ruang layanan kantor pieh sesuai SPK nomor: 447/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 21 November 2025 senilai Rp288,765,741,-;
2. Paket Perencanaan intrior ruang layanan kantor pieh sesuai SPK nomor: 169.H/LKKPN/PPK.PL/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 senilai Rp6,993,000,-;
3. Paket pengawasan interior ruang layanan kantor pieh sesuai SPK nomor: 447.c/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 21 November 2025 senilai Rp3,000,000,-;
4. Paket sarana prasarana penanganan interaksi negatif/konflik buaya manusia sesuai SPK nomor: 455/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 24 November 2025 senilai Rp99,636,882.
5. Paket pengawasan sarana prasarana penanganan interaksi negatif/konflik buaya manusia sesuai SPK nomor:

490/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 24 November 2025 senilai Rp2,000,000,-

6. Paket perencanaan sarana prasarana penanganan interaksi negatif/konflik buaya manusia sesuai SPK nomor: 169.H.1/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 31 Oktober 2025 senilai Rp2,997,000,-

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.523.288.096	263.993.000	1.613,41
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	403.392.623	3.035.054.320	(86,71)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	4.926.680.719	3.299.047.320	49,34
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	4.926.680.719	3.299.047.320	49,34

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh Pada tahun 2025 tidak ada realisasi belanja modal tanah, hal ini sama dengan tahun 2024 tidak ada belanja modal tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp263.993.000, mengalami penurunan sebesar 100,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Tahun 2025 tidak ada belanja penambahan nilai peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	263.993.000	(100,00)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	263.993.000	(100,00)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	263.993.000	(100,00)

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp403.392.623 dan Rp3.035.054.320 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami penurunan sebesar 86,71% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Penurunan belanja modal gedung dan bangunan di tahun 2025 dikarenakan hanya ada belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan berupa interior ruang layanan kantor Pieh dan sarana prasarana interaksi negatif/konflik buaya manusia yang merupakan belanja yang melekat pada belanja modal gedung dan bangunan dengan nilari total Rp403,392,632,- sementara pada tahun 2024 ada belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp3,035,054,320,-. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

1. Paket interior ruang layanan kantor pieh sesuai SPK nomor: 447/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 21 November 2025 senilai Rp288,765,741,-;
2. Paket Perencanaan intrior ruang layanan kantor pieh sesuai SPK nomor: 169.H/LKKPN/PPK.PL/X/2025 tangal 31 Oktober 2025 senilai Rp6,993,000,-;
3. Paket pengawasan interior ruang layanan kantor pieh sesuai SPK nomor: 447.c/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 21 November 2025 senilai Rp3,000,000,-;
4. Paket sarana prasarana penanganan interaksi negatif/konflik buaya manusia sesuai SPK nomor: 455/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 24 November 2025 senilai Rp99,636,882;

5. Paket pengawasan sarana prasarana penanganan interaksi negatif/konflik buaya manusia sesuai SPK nomor: 490/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 24 November 2025 senilai Rp2,000,000,-;
6. Paket perencanaan sarana prasarana penanganan interaksi negatif/konflik buaya manusia sesuai SPK nomor: 169.H.1/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 31 Oktober 2025 senilai Rp2,997,000,-

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	2.400.885.520	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	-	236.945.299	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	403.392.623	397.223.501	1,55
Jumlah Belanja Kotor	403.392.623	3.035.054.320	(86,71)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	403.392.623	3.035.054.320	(86,71)

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2025 tidak ada penambahan dan pengurangan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini

disebabkan Pada tahun 2025 tidak ada realisasi belanja modal lainnya pada satker Loka KKPN Pekanbaru.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2025 dan 2024			
URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja
Bantuan Sosial
Rp0,-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial Pada tahun 2025 tidak ada realisasi belanja barang Sosial pada Satker Loka KKPN Pekanbaru.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2025 dan 2024			
URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Belanja
Dibayar
Dimuka
(Prepaid)
Rp2.619.190.000,-

C.1 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) :

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.619.190.000 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut:

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	2.619.190.000,00	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	2.619.190.000	-

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) pada LKKPN Pekanbaru pada priode laporan keuangan Audited 2025 merupakan peruntukan sewa kantor untuk satuan pelayanan di 11 wilayah kerja LKKPN Pekanbaru, dimana masa sewa bervariasi ada yang 3 tahun, 2 tahun dan ada yang 1 tahun dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilker	Nilai Kontrak	Masa Sewa	Berlaku Kontrak	No Kontrak	harga sewa / tahun	Akhir sewa
1	Aceh	165.000.000	3 tahun	1 Januari 2026	383/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 Tanggal 19 November 2025	55.000.000	
2	babel	178.200.000	3 tahun	1 Januari 2026	386/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 Tanggal 19 November 2025	59.400.000	
3	letung	180.000.000	3 tahun	1 Januari 2026	388/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 Tanggal 19 November 2025	60.000.000	
4	medan	570.000.000	3 tahun	1 Januari 2026	564/LKKPN/PPK.Pokja/XII/2025 Tanggal 12 Desember 2025	190.000.000	
5	lampung	300.000.000	3 tahun	1 Januari 2026	566/LKKPN/PPK.Pokja/XII/2025 Tanggal 12 Desember 2025	100.000.000	
6	Tj. Pinang	234.000.000	3 tahun	1 Januari 2026	563/LKKPN/PPK.Pokja/XII/2025 Tanggal 12 Desember 2025	78.000.000	31 Desember 2028
7	tarempa	411.000.000	3 tahun	1 Januari 2026	567/LKKPN/PPK.Pokja/XII/2025 Tanggal 12 Desember 2025	137.000.000	
8	bengkulu	99.000.000	2 tahun	1 Januari 2026	385/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 Tanggal 19 November 2025	49.500.000	31 Desember 2027
9	palembang	295.240.000	2 tahun	1 Januari 2026	565/LKKPN/PPK.Pokja/XII/2025 Tanggal 12 Desember 2025	147.620.000	
10	batam	118.000.000	1 tahun	1 Januari 2026	384/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 Tanggal 19 November 2025	118.000.000	31 desember 2026
11	jambi	68.750.000	1 tahun	1 Januari 2026	385/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 Tanggal 19 November 2025	68.750.000	
total		2.619.190.000					

Persediaan
Rp794.000,-

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp794.000 dan Rp829.700. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	794.000	829.700
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	794.000	829.700

Persediaan tersebut di atas dalam Saldo awal Januari 2025 Persediaan senilai Rp829.700,- mutasi tambah senilai Rp42,153,523,- dan mutasi kurang senilai Rp42.189.223,-. Sehingga Saldo Barang Persediaan per 31 Desember 2025 dengan nilai saldo pada priode pelaporan keuangan *Audited* / Tahunan 2025 senilai Rp794.000,-. Sisa saldo barang persediaan yaitu berupa pulpen berjumlah 8 buah dalam kondisi baik, kertas HVS 80 gram A4 berjumlah 6 rim dalam kondisi baik, tinta epon warna berjumlah 4 buah dalam kondisi baik.

Tanah
 Rp5.587.783.737
 37

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5.587.783.737 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut Saldo tanah pada neraca per 31 Desember 2024 adalah seluas 16.400 m2, senilai Rp5.587.783.737,- dan pada *Audited* TA. 2025 atau priode tahunan tidak terdapat penambahan aset tanah sehingga saldo pada 31 Desember 2025 adalah tetap senilai Rp Rp5.587.783.737,-. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 September 2025	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2025

No	Luas m2	Lokasi	Nilai
1	10,000	Jl. Budiluhur Kel. Mentangor Kec. Kulim Pekanbaru	5,470,712,000
2	6,400	Desa Pesisir Timur Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas	117,071,737
3			
4			
Jumlah			5,950,000,000

Rincian tanah pada Satker 477456 LKKPN Pekanbaru pada tanggal pelaporan yang dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga tidak ada.

C.4 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp12.281.990.327 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	7.328.220
Pembelian	4.523.288.096
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	77.231.000
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	2.926.163.191
	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.649.855.905
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(7.814.162.687)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	(6.164.306.782)

- Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:
1. Penambahan jumlah unit sebanyak 2 unit berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) senilai Rp1.126.400.000,- kode barang 3020102003 NUP 3 dan 4, yang mana merupakan hasil pengadaan berdasarkan BAST nomor 533/LKKPN/PPK.E-Purchasing/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025;
 2. Penambahan jumlah unit sebanyak 3 unit berupa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya senilai Rp1.425.000.001,- kode barang 3020103999 NUP 3-5, yang mana merupakan hasil pengadaan berdasarkan BAST nomor 531/LKKPN/PPK.E-Purchasing/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025;

3. Mutasi tambah sebanyak 30 unit berupa meja kerja kayu, kode barang 3050201002 NUP 71-100 dengan nilai total perolehan sebesar Rp85.359.000,- berdasarkan BAST nomor 659/LKKPN/PPK.E-Purchasing/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025;
4. Mutasi tambah sebanyak 55 unit berupa Kursi Besi/Metal, kode barang 3050201003 NUP 122-176 dengan nilai total perolehan sebesar Rp111.677.100,- berdasarkan BAST nomor 659/LKKPN/PPK.E-Purchasing/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025;
5. Mutasi tambah sebanyak 6 unit berupa A.C. Split, kode barang 3050204004 NUP 45-50 dengan nilai total perolehan sebesar Rp35.964.000,- berdasarkan BAST nomor 522/LKKPN/PPK.E-Purchasing/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025;
6. Pada periode Tahunan TA. 2025 juga terdapat mutasi tambah berupa pencatatan pembatalan penghentian penggunaan atas BMN berupa 1 unit Compressor Udara NUP 3150303017 senilai Rp77.231.000,- berdasarkan surat keterangan nomor B.714/LKKPN/KP.120/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025;
7. Mutasi tambah sebanyak 1 unit berupa Televisi, kode barang 3050206002 NUP 11 dengan nilai perolehan sebesar Rp57.999.999,- berdasarkan BAST nomor 633/LKKPN/PPK.E-Purchasing/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025;
8. Mutasi tambah sebanyak 2 unit Microphone/Wireless MIC, kode barang 3060101036 NUP 1 dan 2 dengan nilai total perolehan Rp4.595.400,- berdasarkan BAST nomor 449/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 22 November 2025;
9. Mutasi tambah sebanyak 4 unit Kamera Udara, kode barang 3060105047 NUP 8-11 dengan nilai total perolehan Rp302.282.543,- berdasarkan BAST nomor 88/LKKPN/PPK.E-Purchasing/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025 dan BAST nomor 448/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 22 November 2025;
10. Mutasi tambah sebanyak 3 unit Camera Digital, kode barang 3060102128 NUP 9-11 dengan nilai total perolehan Rp64.202.400,- berdasarkan BAST nomor 449/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 22 November 2025
11. Mutasi tambah sebanyak 8 unit Battery Lithium-I kode barang 3.06.02.01.023 NUP 1-8 dengan nilai total perolehan Rp29.667.397,- berdasarkan BAST nomor 101/LKKPN/PPK.E-

Purchasing/IX/2025 tanggal 22 September 2025 dan BAST nomor 448/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 22 November 2025. Atas baterai NUP 1 dan 2 telah dilakukan transaksi mutasi kurang

12. Mutasi tambah sebanyak 32 unit Notebook, kode barang 3100102003, NUP 72-103 dengan nilai total Rp829.608.497,- berdasarkan BAST nomor 86/LKKPN/PPK.E-Purchasing/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025, BAST nomor 527/LKKPN/PPK.PL/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025, BAST nomor 529/LKKPN/PPK.PL/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025, dan BAST nomor 633/LKKPN/PPK.E-Purchasing/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025;
13. Mutasi tambah sebanyak 6 unit Tablet PC, kode barang 3100102009, NUP 11-16 dengan nilai total Rp88.748.349,- berdasarkan BAST nomor 106/LKKPN/PPK.E-Purchasing/IX/2025 tanggal 29 September 2025 dan BAST nomor 538/LKKPN/PPK.E-Purchasing/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025;
14. Mutasi tambah sebanyak 2 unit Microphone/Wireless MIC, kode barang 3060101036 NUP 1 dan 2 dengan nilai total perolehan Rp4.595.400,- berdasarkan BAST nomor 449/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 22 November 2025;
15. Mutasi tambah sebanyak 4 unit Kamera Udara, kode barang 3060105047 NUP 8-11 dengan nilai total perolehan Rp302.282.543,- berdasarkan BAST nomor 88/LKKPN/PPK.E-Purchasing/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025 dan BAST nomor 448/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 22 November 2025;
16. Mutasi tambah sebanyak 3 unit Camera Digital, kode barang 3060102128 NUP 9-11 dengan nilai total perolehan Rp64.202.400,- berdasarkan BAST nomor 449/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 22 November 2025;
17. Saldo akun Peralatan dan Mesin secara keseluruhan intrakomptabel dan ekstrakomptabel per 31 Desember 2024 adalah 1.050 unit, senilai Rp10.722.371.462,-. Saldo per 31 Desember 2025 terdapat perubahan yakni menjadi 1.153 unit, senilai Rp12.364.005.567,-.
18. Pengurangan jumlah unit sebanyak 1 unit berupa sepeda motor kode barang 3020104001 NUP 10 senilai Rp27.468.000,- yang mana merupakan transaksi penghentian penggunaan

berdasarkan surat keterangan nomor B.634/LKKPN/KP.120/V/2025 tanggal 22 Mei 2025. Terhadap BMN tersebut telah diajukan usulan penghapusan berdasarkan surat nomor B.741/LKKPN/PL.750/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 dan telah terbit surat permohonan penghapusan BMN dari Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan yang ditujukan kepada KPKNL Pekanbaru berdasarkan surat nomor KPB.232/DJPK.1/PL.750/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025. BMN tersebut telah berhasil dilelang berdasarkan Risalah Lelang nomor 495/03.04/2025-1 tanggal 18 Desember 2025. Untuk serah terima BMN hasil lelang telah dilakukan berdasarkan BAST nomor B.1714/LKKPN/PL.450/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025. Selanjutnya akan dilakukan proses permohonan penerbitan SK Penghapusan yang rencananya akan dilakukan pada Semester I TA 2026;

19. Pada periode Tahunan TA. 2025 terdapat mutasi kurang sebanyak 13 unit senilai Rp42.696.000,- berupa transaksi penghentian penggunaan berdasarkan surat keterangan nomor B.634/LKKPN/KP.120/V/2025 tanggal 22 Mei 2025. Terhadap BMN tersebut telah diajukan usulan penghapusan berdasarkan surat nomor B.740/LKKPN/PL.750/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 dan telah terbit surat persetujuan penghapusan BMN dari Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan berdasarkan surat nomor KPB.233/DJPK.1/PL.750/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025. Untuk proses selanjutnya, akan dilakukan permohonan lelang ke KPKNL Batam yang rencananya akan dilakukan di TahunanI TA 2025. Dengan adanya transaksi tersebut, maka saldo akhir per 30 Juni 2025 untuk Peralatan Olahraga sebanyak 27 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp19.326.000,-;
20. Telah dilakukan lelang BMN pada tanggal 19 Agustus 2025, bertempat di KPKNL Batam, yang mana diadakan berdasarkan Surat Penetapan Lelang nomor JL-665/1/KNL.0314/2025 tanggal 31 Juli 2025, atas 64 unit BMN dengan nilai limit Rp635.231,-. Lelang telah berhasil dilaksanakan dengan harga lelang Rp635.231,-, berdasarkan Risalah Lelang nomor 257/03.04/2025-01 tanggal 19 Agustus 2025, dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Permohonan Penerbitan SK Penghapusan nomor B.1261/LKKPN/PL.750/IX/2025 tanggal 31 Desember 2025;

- 21.Telah dilakukan lelang BMN pada tanggal 19 Agustus 2025, bertempat di KPKNL Batam, yang mana diadakan berdasarkan Surat Penetapan Lelang nomor JL-666/1/KNL.0314/2025 tanggal 31 Juli 2025, atas 1 unit BMN (Alat Angkutan Darat Bermotor – Sepeda Motor NUP 10) dengan nilai limit Rp838.000,-. Lelang telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak laku berdasarkan surat Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru tanggal 21 Agustus 2025. Atas hal ini, direncanakan akan dilakukan lelang ulang di periode Triwulan IV;
- 22.Pengurangan jumlah unit sebanyak 1 unit berupa Kapal Pengawas Perikanan kode barang 3020303031 NUP 3 senilai Rp2.663.348.691,- yang mana merupakan transaksi penghentian penggunaan berdasarkan Surat Keterangan nomor B.1255/LKKPN/KP.120/IX/2025 tanggal 29 September 2025. Pada saat laporan ini disusun, kapal tersebut masih berstatus barang bukti di Kepolisian dikarenakan belum terdapat putusan hukum yang inkrah, sehingga tindak lanjut atas pencatatan BMN belum dapat dilakukan;

C.5 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.267.854.943 dan Rp0. Mutasi *Rp8,267,854,943,-* transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan Melalui KDP	403.392.623
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	403.392.623
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(973.894.183)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	(570.501.560)

Pada periode Tahunan TA. 2025 terdapat perubahan nilai aset yang berasal dari KDP, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan pada BMN Bangunan Gedung Kantor Permanen, kode barang 4010101001 NUP 1, yang mana merupakan penambahan nilai dari pembuatan sarana penanganan interaksi negatif buaya (kandang buaya) di kantor Pekanbaru. Penambahan ini dilakukan melalui transaksi KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) dengan nomor KDP 13, dan nilai total pengerjaan adalah sebesar Rp104.633.882,-. Pekerjaan tersebut telah selesai sehingga dilakukan transaksi pengembangan melalui KDP, dan pada akhirnya menambahkan nilai aset Gedung sebesar nilai KDP tersebut;

Penambahan nilai Gedung dan Bangunan pada BMN Bangunan Gedung Kantor Lainnya, kode barang 4010101999 NUP 1, yang mana merupakan penambahan nilai dari pekerjaan pembuatan interior ruang pelayanan kantor Pieh di Padang. Penambahan ini dilakukan melalui transaksi KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) dengan nomor KDP 12, dan nilai total pengerjaan adalah sebesar Rp298.758.741,-. Pekerjaan tersebut telah selesai sehingga dilakukan transaksi pengembangan melalui KDP, dan pada akhirnya menambahkan nilai aset Gedung sebesar nilai KDP tersebut.

C.6 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan,Jaringan dan Irigasi
Rp2.966.112.339

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.2,966,112,339 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	(2,395,530,355)
Nilai Buku per	(2,395,530,355)

Mutasi tambah:

Tidak ada

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp11.286.758
665,-

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp11.286.758.665 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2025 dan 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	12.281.990.327	(7.814.162.687)	4.467.827.640
2	Gedung dan Bangunan	8.267.854.943	(973.894.183)	7.293.960.760
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.966.112.339	(2.498.701.795)	467.410.544
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		23.515.957.609	(11.286.758.665)	12.229.198.944

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 ini. Nilai Buku Aset Tetap sebesar Rp12.229.198.944 merupakan nilai manfaat ekonomis aset yang masih dapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi entitas. Akumulasi penyusutan sebesar Rp11.286.758.665 merupakan alokasi sistematis atas nilai perolehan aset tetap selama masa manfaatnya dan telah diakui sebagai beban penyusutan pada Laporan Operasional;

- Peralatan dan Mesin memiliki nilai buku sebesar Rp4.467.827.660 yang menunjukkan aset masih digunakan dalam operasional namun sebagian telah mengalami pemakaian selama masa manfaatnya. Penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin sejumlah (Rp7.814.162.687) atau sekitar 64% umur aset sudah terpakai serta masih memiliki masa manfaat ekonomi relatif besar dan masih aktif digunakan dalam operasional perkantoran, yang meliputi kendaraan dinas, komputer, peralatan kantor dan sebagainya. Dimana sebagian besar aset sudah lama digunakan namun belum habis masa manfaatnya.

- Gedung dan Bangunan memiliki nilai buku sebesar Rp7.293.960.780 yang menunjukkan kondisi aset masih relatif baru dan masih memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Penyusunan aset tetap Gedung dan Bangunan (Rp973.984.183) mengindikasikan bahwa aset tetap Gedung dan Bangunan baru terpakai 12%, serta bangunan relatif baru dan atau hasil dari renovasi. Hal ini dikarenakan adanya penambahan nilai bangunan dan kapitalisasi renovasi.
- alan, Irigasi dan Jaringan memiliki nilai buku sebesar Rp467.410.634 yang menunjukkan aset telah mendekati akhir masa manfaatnya namun masih digunakan dalam mendukung layanan operasional. Penyusutan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp2.498.701.705) atau sekitar 84% umur aset sudah terpakai dan hampir mendekati akhir umur manfaat hal ini beresiko aset tersebut sering rusak, memerlukan biaya pemeliharaan meningkat serta diperlukannya rehabilitasi atau perbaikan.

Secara umum Aset Tetap masih digunakan dalam mendukung kegiatan operasional entitas dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual

Aset Lain-lain
Rp2.721.102.6
91

C.8 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp2.721.102.691 dan Rp302.530.519.300. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	302,530,519,300
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	2,926,163,191
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	453,181,430
	-
	-
	-
Saldo per 31 September 2025	305,003,501,061
Akumulasi Penyusutan 31 September 2025	(1,069,895,278)
Nilai Buku per 31 September 2025	303,933,605,783

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi bertambah sebanyak 24 unit dengan nilai total Rp2.695.998.691,- yang mana merupakan transaksi penghentian penggunaan berdasarkan Surat Keterangan nomor B.1255/LKKPN/KP.120/IX/2025 tanggal 29 September 2025. Keseluruhan BMN adalah terdiri dari Kapal Pengawas Perikanan dan BMN lain yang ada di dalamnya yang terbakar pada kejadian pembakaran kapal pada tanggal 12 September 2025 di perairan Air Hadji, Pesisir Selatan, Sumatera barat. Pada saat laporan ini disusun, belum terdapat surat balasan dari Kepolisian Resor Pesisir Selatan atas informasi terkait proses penyelidikan sebagaimana tindak lanjut dari surat nomor B.152/LKKPN/PL.760/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Permohonan Keterangan Proses Penyelidikan, sehingga tindak lanjut dari atas pencatatan BMN belum dapat dilakukan;

- Mutasi bertambah atas 66 unit BMN senilai Rp238.386.300,- yang dihentikan penggunaannya berdasarkan surat keterangan nomor B.634/LKKPN/KP.120/V/2025 tanggal 22 Mei 2025. Terhadap BMN tersebut telah diajukan usulan penghapusan berdasarkan surat nomor B.740/LKKPN/PL.750/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 dan telah terbit surat persetujuan penghapusan BMN dari Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan berdasarkan surat nomor KPB.233/DJPK.1/PL.750/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025. Pada 64 unit dari 66 BMN tersebut telah berhasil dilelang berdasarkan Risalah Lelang nomor 257/03.04/2025-01 tanggal 19 Agustus 2025 dan telah terbit SK Penghapusan nomor 1582/KEPMEN-KP/PL.750/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025.

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp1.207.495.8
96,-*

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp1.207.495.896 dan Rp30.230.814.570. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh

satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	2.721.102.691	(1.207.495.896)	1.513.606.795
-	-	-	-
Total	2.721.102.691	(1.207.495.896)	1.513.606.795

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp3,881,867,-

C.10 Beban yang Masih Harus Dibayar

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.881.867 dan Rp320.993.284. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	308.164.098
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	3.881.867	12.829.186
	-	-
Total	3.881.867	320.993.284

Beban barang yang masih harus dibayar yang muncul pada Neraca lapoaran keuangan tahunan 2025 merupakan berasal dari belanja langganan listrik kantor pieh senilai Rp1,626,450,- dan belanja langganan jasa internet kantor LKKPN Pekanbaru senilai Rp432,527, internet pos pelayanan Tarempa senilai Rp1,026,750,- dan internet pos pelayanan Letung senilai Rp670,440,-. sehingga total beban belanja barang yang harus dibayarkan sejumlah Rp3,881,867,-

Ekuitas

Rp21.946.691.609,-

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21.946.691.609. dan Rp1.100.908.775.517. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP

Rp229,286,85
0,-

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp229.286.850 dan Rp162.246.370. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 41,32. Hal tersebut disebabkan oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak satker LKKPN Pekanbaru pada tahun 2025 bersumber dari akun pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Akun 425151 (pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi yang merupakan akun perubahan dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan senilai Rp3,866,850,- hal ini dikarenakan pada priode sampai priode Audited / Audited 2025 adanya penurunan tarif sewa rumah negara;
- 2. Akun 425629 (Pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya) mengalami kenaikan senilai Rp225,420,000,- atau sebanyak 70.23% atau senilai Rp93,000,000,- dibandingkan tahun 2024. hal ini dikarenakan penerimaan akun 425629 mengalami peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	225.420.000	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi	-	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	-	-	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	3.866.850	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	229.286.850,00	-	-

Terdapat selisih pendapatan antara LRA dan LO senilai Rp6.560.131,- yang merupakan atau bersumber dari pendapatan penjualan peralatan dan mesin senilai Rp.5.819.541,- yakni dari hasil pelepasan aset lingkup LKKPN Pekanbaru selaman periode pelaporan dan penerimaan kembali belanja TAYL senilai Rp740.590,-

merupakan pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yg lalu yaitu tunjangan umum bagi pegawai JFT APJK pada bulan nov - desember 2024 dengan nilai Rp740.100 (ahmad fahruddin dan ilham), pengembalian pembulatan gaji Rp490 (Rp17 kenaikan pangkat Desember 2024 satria Rp473 kekurangan kenaikan pangkat Januari-November 2024 domi)

*Beban
Pegawai
Rp5,940,852,0
02,-*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.940.852.002 dan Rp5.409.863.282.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 9,82 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan beban gaji di tahun 2025 naik 9.82% atau senilai Rp5,940,852,002,- dan di tahun 2024 senilai Rp5,409,863,282,- dikarenakan adanya penambahan belanja tunjangan suami/istri pegawai fungsional APJK Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (P3K) pada tahun 2025 an. Siti Komariah dan penambahan tunjangan anak PPPK serta tunjangan umum PPPK. serta adanya penambahan tunjangan fungsional P3K yang berlaku mulai awal Januari 2025. serta adanya penambahan pegawai (ASN) 2 orang atas nama Amalia Sekar Ayuningtyas dan Bagus Bagaskoro pada bulan Juni 2025 dan pindahan pegawai dari BRSDM a.n Ilham.

Nilai Belanja Gaji memiliki selisih antara LRA Rp5,981,021,253,- dengan nilai Beban di LO senilai Rp5,940,852,002,- selisih antara LRA dan LO senilai Rp39,058,616,- yang merupakan belanja akrual kekurangan tunjangan kinerja priode Desember 2024 untuk 9 (sembilan) orang pegawai.

Ada pengembalian belanja pegawai senilai Rp1.110.609,- yang bersumber dari belanja pembulatan gaji PNS (511119) senilai Rp609,- dan Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) senilai Rp1.110.000,- merupakan pengembalian tunjangan umum an. Siti Komariah dan Achmad Facruddin dikarenakan pengajuan gaji bulan Januari dan bulan februari menerima tunjangan umum, sementara pada bulan maret sudah keluar peraturan untuk pencairan tunjangan fungsional APJK yang berlaku mulai bulan Januari 2025. Rincian Beban Pegawai Tahunan (*Audited*) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.972.542.040	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	28.398	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	155.463.230	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	41.485.880	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	12.600.000	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	213.100.000	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	11.665.051	-	-
Beban Tunj. Beras PNS	113.192.460	-	-
Beban Uang Makan PNS	257.649.000	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	36.840.000	-	-
Beban Uang Lembur	28.440.000	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2.749.088.801	-	-
Beban Gaji Pokok PPPK	124.348.000	-	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	3.316	-	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	8.255.880	-	-
Beban Uang Makan PPPK	25.033.000	-	-
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja P	164.161.496	-	-
Beban Uang Lembur PPPK	1.839.000	-	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	9.759.190	-	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	8.100.000	-	-
Jumlah	5.940.852.002	-	-

Beban
Persediaan
Rp42,189,223,
-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode Audited 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp42.189.223 dan Rp54.296.003,-

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 24,75 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan pada priode Audited TA.2025.

Saldo awal Januari 2025 Persediaan senilai Rp829,700,- mutasi tambah senilai Rp42,153,523,- dan mutasi kurang senilai Rp42,189,223,-. Sehingga Saldo Barang Persediaan per 31 Desember 2025 (Audited Tahunan TA.2025) senilai Rp794.000,-. Sisa saldo barang persediaan yaitu berupa pulpen dengan saldo hasil opnam fisik berjumlah 8 buah dalam kondisi baik, kertas HVS 80 gram A4 berjumlah 6 RIM kondisi baik, Tinta Epson Warna berjumlah 4 dalam kondisi.

selisih beban persediaan Audited (Audited) TA.2025 pada LRA belanja persediaan senilai Rp38.618.323,- dan beban pesediaan pada LO senilai Rp42,189,223,- dengan nilai selisih senilai Rp3.570.900,-. Selisih beban persediaan antara LRA dan LO merupakan persediaan yang belanjanya menggunakan akun belanja barang pemeliharaan peralatan dan mesin (523123) senilai Rp3.535.200,- serta selisih antara saldo awal persediaan awal tahun 2025 dan saldo awal tahun 2026 senilai Rp35.700,- Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	42.189.223	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	42.189.223,00	-	-

Beban Barang
dan Jasa
Rp5.765.670.8
42,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.765.670.842,- dan Rp5.215.367.955,-

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 10,552 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Secara keseluruhan beban belanja barang dan jasa tahun 2025 mengalami kenaikan beban barang dan jasa pada priode laporan *Audited* tahun 2025 senilai Rp5.765.670.842,- sedangkan pada tahun 2024 senilai Rp5,215,367,955,-. Kenaikan beban belanja ini terjadi dikarenakan sampai priode pelaporan *Audited* tahun 2025 anggaran belanja LKKPN Pekanbaru adalah adanya penambahan anggaran yang bersumber dari PNBP.

Beban barang dan jasa di LO senilai Rp.5.765.670.842,- dan belanja barang dan jasa di LRA senilai Rp8.393.808.161,-. ada selisish senilai Rp2.628.137.319 yang terdiri dari Rp8,947,319,- yang merupakan selisih belanja akrual pada awal tahun 2025 dan awal tahun 2026 dan Rp2.619.190.000,- yang merupakan belanja sewa kantor wilayah 11 (sebelas) lokasi se Sumatera. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	163.384.010	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.705.500	-	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	113.280.000	-	-
Beban Barang Operasional Lainnya	60.345.000	-	-
Beban Bahan	553.482.504	-	-
Beban Honor Output Kegiatan	8.160.000	-	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	63.998.014	-	-
Beban Sewa	224.950.000	-	-
Beban Jasa Profesi	320.000	-	-
Jumlah	5.765.670.842	-	-

Beban
Pemeliharaan
Rp492,343,104,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp492.343.104 dan Rp426.313.157.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 15,49 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Pada priode Laporan Keuangan *Audited* tahun 2025 atau tahunan 2025 Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin mengalami penurunan (11.95%) atau senilai (Rp30,639,137,-) beban pemeliharaan peralatan dan mesin ini merupakan belanja yang diperuntukkan pemeliharaan BMN yang ada di LKKPN Pekanbaru, dimana pada tahun 2025 mengalami penurunan dikarenakan pemeliharaan peralatan dan mesin sudah banyak dilakukan pada tahun 2024. Sementara belanja pemeliharaan gedung dan bangunan mengalami kenaikan 56.90% atau senilai Rp96,669,084,- yang merupakan beban pemeliharaan untuk kantor LKKPN Pekanbaru dan kantor pelyanan terpadu di TWP Pieh Bungus. kenaikan ini dikarenakan pada tahun 2025 LKKPN Pekanbaru melakukan pemeliharaan terhadap 2 gedung kantor yakni gedung kantor LKKPN Pekanbaru yang berlokasi di Pekanbaru dan gedung kantor pelayanan Pieh di Bungus, sementara pada tahun 2024 hanya 1 gedung kantor yakni kantor LKKPN Pekanbaru. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	225.783.742	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	266.559.362	-	-
	-	-	-
Jumlah	492.343.104	-	-

Terdapat selisih Beban Pemeliharaan antara LRA dan LO senilai Rp3.535.200,- yang merupakan Realisasi Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin namun masuk beban pada Laporan Operasional.

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp1.204.347.7
06,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.204.347.706,- dan Rp2.883.849.595,- atau turun sebesar (58.23%)

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 58,24 persen disebabkan oleh Penurunan beban perjalanan dinas di *Audited* tahun 2025 sebesar (58.24%) atau senilai (Rp1,679,501,889,-) hal ini dikarenakan seluruh anggaran LKKPN Pekanbaru bersumber dari PNBPN dan RM yang terdampak dari efisiensi anggaran termasuk untuk belanja perjalanan. Secara rinci penurunan beban perjalanan biasa sebesar (49.03%) atau senilai (Rp967,440,669,-) dan beban perjalanan dinas dalam kota sebesar (67.67%) atau senilai (Rp404,845,000,-).

Sementara pada priode pelaporan keuangan *Audited* tahun 2025 adanya beban perjalanan biasa - luar negeri senilai Rp5,314,680,- yakni dengan tujuan Philipina atas nama Muhammad Lukman Faishol, SH, M.Si. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	1.005.573.026	1.973.013.695	(49,03)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	193.460.000	598.305.000	(67,67)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	20.700.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	291.830.900	(100,00)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	5.314.680	-	-
	-	-	-
Jumlah	1.204.347.706,00	2.883.849.595	(58,24)

Tidak ada selisih antara beban di nilai pelaporan LRA dan laporan LO.

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp199,510,000,-

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	199,510,000.00	(100.00)
	-	-	-
Jumlah	-	199,510,000	(100.00)

Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1,476,289,7
91,-

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.476.289.791 dan Rp0.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	956.383.692	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	174.561.792	-	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	-
Beban Penyusutan Irigasi	206.516.889	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	1.226.800	-	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Jumah Penyusutan	1.338.689.173	-	-
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	1.338.689.173	-	-

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp1.889.360

D.9 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-1.889.360 dan Rp-677.149.864,-

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-1,889,360 dan Rp-677.149.864,-

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(1.889.360)	(677.149.864,00)	(100)
	-	-	-
Jumlah	(1.889.360,00)	(677.149.864)	(100)

Beban kerugian pelepasan aset merupakan 64 unit BMN senilai Rp238.386.310,- yang dihentikan penggunaannya berdasarkan surat keterangan nomor B.634/LKKPN/KP.120/V/2025 tanggal 22 Mei 2025. Pada 64 unit BMN tersebut terjadi transaksi mutasi berkurang karena telah dilakukan transaksi Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan (Kode transaksi SAKTI : 911) berdasar kepada telah terbitnya surat persetujuan penghapusan BMN dari Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan berdasarkan surat nomor KPB.233/DJPK.1/PL.750/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025. Transaksi ini (911) memunculkan beban pelepasan aset (kode akun 596111) pada neraca keuangan LKKPN Pekanbaru senilai Rp1.899.360,- yang berasal dari nilai buku yang masih ada pada beberapa aset dari total aset yang dicatatkan penghapusannya tersebut, yaitu berupa:

- GPS Receiver, dengan nilai buku Rp1.537.360,-; dan
- Kursi Fiber Glass/Plastik, dengan nilai buku Rp352.000,-

Untuk proses selanjutnya, akan dilakukan permohonan lelang ke KPKNL Batam yang rencananya yang kan dilakukan di *Audited (Audited)*I TA 2025.

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp6.560.131,-

D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.560.131 dan Rp2.688.078,-

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	740.590	119.245,00	521,07
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.568.833,00	(100,00)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.819.541	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	6.560.131,00	2.688.078	144,05

Penerimaan kembali beban pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp740.590 merupakan pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yg lalu yaitu tunjangan umum bagi pegawai JFT APJK pada bulan nov - desember 2024 dengan nilai Rp740.100 (ahmad fachruddin dan ilham), pengembalian pembulatan gaji Rp490 (Rp17 kenaikan pangkat Desember 2024 satria Rp473 kekurangan kenaikan pangkat Januari-November 2024 domi)

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp15.831.924.324</i>	E.1 Ekuitas Awal Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.15,831,924,324.00 dan Rp.14,372,562,935.00
<i>Defisit LO</i> <i>Rp14.687.735.047,-</i>	E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.14.687.735.047,- dan Rp.15.820.144.954,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</i> <i>Rp0</i>	E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.
<i>Transaksi Antar Entitas</i> <i>Rp894.518</i>	E.4 Transaksi Antar Entitas Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Juni 2025 dan 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-894,518 dan Rp.-845,875 yaitu sebagai berikut: Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari: Koreksi lainnya merupakan kekurangan pajak tunjangan kinerja untuk 8 orang pegawai bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada Januari 2025, hal ini terjadi dikarenakan pada saat melakukan penjurnalan tukin susulan 9 orang, 1 orang tercatat dengan nominal bruto, sementara 8 orang lainnya nilai yang tercatat adalah neto. pada akhir tahun anggaran 2024 melakukan jurnal manual untuk belanja akrual senilai Rp. 38.164.098,00 pada debit (512411) yang merupakan kekurangan belanja pegawai tukin susulan dan pada kredit (21211) dengan nilai yang sama. selanjutnya setelah priode 14 dilakukan jurnal bakik terhadap jurnal manual tersebut dengan komposisi (212111) pada debit

dan beban tukin susulan di kredit (512411) dengan nilai yang sama yakni Rp38.164.098,00 sementara jumlan nominal tukin bruto ke 9 orang nya adalah : Rp39.058.616,00 terdapat selisih senilai Rp.894.518,00 dan seteleh di telusuri merupakan pajak tukin susulan. selanjutnya berdasarkan diskusi dengan KPPN dilakukan jurnal koreksi untuk memperbaiki pencatatan kekurangan pajak tunjangan kinerja untuk 8 orang pada priode *Audited (Audited)* 2025.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
	-
	-
Jumlah	-

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00.

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember s2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-845,875. .

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Juni 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
Jumlah	-

E.4.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2025 dan 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-894,518 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah Koreksi lainnya merupakan kekurangan pajak tunjangan kinerja untuk 8 orang pegawai bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada Januari 2025, hal ini terjadi dikarenakan pada saat melakukan penjurnalan tukin susulan 9 orang, 1 orang tercatat dengan nominal bruto, sementara 8 orang lainnya nilai yang tercatat adalan neto. pada akhir tahun anggaran 2024 melakukan jurnal manual untuk belanja akrual senilai Rp. 38.164.098,00 pada debit (512411) yang merupakan kekurangan belanja pegawai tukin susulan dan pada kredit (21211) dengan nilai yang sama. selanjutnya setelah priode 14 dilakukan jurnal bakik terhadap jurnal manual tersebut dengan komposisi (212111) pada debit dan beban tukin susulan di kredit (512411) dengan nilai yang sama yakni Rp38.164.098,00 sementara jumlan nominal tukin bruto ke 9 orang nya adalah : Rp39.058.616,00 terdapat selisih senilai Rp.894.518,00 dan seteleh di telusuri merupakan pajak tukin susulan. selanjutnya berdasarkan diskusi dengan KPPN dilakukan jurnal koreksi untuk memperbaiki pencatatan kekurangan pajak tunjangan kinerja untuk 8 orang pada priode Audited (Audited) 2025.. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :"

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	(894,518)
-	-
Jumlah	(894,518.0)

Transaksi Antar Entitas
Rp20,803,396,850,-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.20.803.396.850 dan Rp.17.280.352.218. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	21.039.243.831
Diterima dari Entitas Lain	(235.846.981)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
-	-
Jumlah	20.803.396.850

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL) / ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 21.039.243.831, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 235.846.981,-

Ekuitas Akhir
Rp21.946.691.609,-

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.21.946.691.609,- dan Rp.15.831.924.324,-.

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

Konstruksi
dalam
Pengerjaan

Saldo awal Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada 01 Januari 2025 adalah 0, dan selama TA. 2025 terdapat beberapa mutasi yaitu :

1. Transaksi Perolehan KDP pada Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan, kode KDP 7010101003, nomor KDP 12, senilai Rp6.993.000,- yang mana merupakan nilai kontrak untuk konsultan perencana dalam rangka pembuatan interior ruang pelayanan Kantor Pieh, berdasarkan SPK nomor 169.H/LKKPN/PPK.PL/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan BAST nomor BAST.169.K/LKKPN/PPK.PL/X/2025 tanggal 10 November 2025;
2. Transaksi Pengembangan KDP pada Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan, kode KDP 7010101003, nomor KDP 12, senilai Rp288.765.741,- yang mana merupakan nilai kontrak untuk pembangunan fisik dalam rangka pembuatan interior ruang pelayanan Kantor Pieh, berdasarkan SPK nomor 447/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 21 November 2025 dan BAST nomor 620/LKKPN/PPK.PL/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025;
3. Transaksi Pengembangan KDP pada Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan, kode KDP 7010101003, nomor KDP 12, senilai Rp3.000.000,- yang mana merupakan nilai kontrak untuk konsultan pengawas dalam rangka pembuatan interior ruang pelayanan Kantor Pieh, berdasarkan SPK nomor 447.c/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 21 November 2025 dan BAST nomor BAST.665/LKKPN/PPK.PL/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025;
4. Transaksi Perolehan KDP pada Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan, kode KDP 7010101003, nomor KDP 13, senilai Rp2.997.000,- yang mana merupakan nilai kontrak untuk konsultan perencana dalam rangka pembuatan sarana prasarana penanganan interaksi negatif/konflik buaya di kantor Pekanbaru, berdasarkan SPK nomor 169.H.1/LKKPN/PPK.PL/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan BAST nomor BAST.169.K.1/LKKPN/PPK.PL/X/2025 tanggal 10 November 2025;

5. Transaksi Pengembangan KDP pada Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan, kode KDP 7010101003, nomor KDP 13, senilai Rp99.636.882,- yang mana merupakan nilai kontrak untuk pembangunan fisik dalam rangka pembuatan sarana prasarana penanganan interaksi negatif/konflik buaya di kantor Pekanbaru, berdasarkan SPK nomor 455/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 24 November 2025 dan BAST nomor BAST.602/LKKPN/PPK.PL/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025;
6. Transaksi Pengembangan KDP pada Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan, kode KDP 7010101003, nomor KDP 13, senilai Rp2.000.000,- yang mana merupakan nilai kontrak untuk konsultan pengawas dalam rangka pembuatan sarana prasarana penanganan interaksi negatif/konflik buaya di kantor Pekanbaru, berdasarkan SPK nomor 490/LKKPN/PPK.PL/XI/2025 tanggal 24 November 2025 dan BAST nomor BAST.662/LKKPN/PPK.PL/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025;
7. Transaksi mutasi kurang KDP pada Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan, kode KDP 7010101003, nomor KDP 12 dengan nilai total Rp298.758.741,- melalui transaksi Pengembangan Melalui KDP (kode transaksi 208) untuk BMN Gedung dan Bangunan pada BMN Bangunan Gedung Kantor Lainnya, kode barang 4010101999 NUP 1 sesuai dengan penjelasan pada Subbab Gedung dan Bangunan point (2);
8. Transaksi mutasi kurang KDP pada Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan, kode KDP 7010101003, nomor KDP 13 dengan nilai total Rp104.633.882,- melalui transaksi Pengembangan Melalui KDP (kode transaksi 208) untuk pada BMN Bangunan Gedung Kantor Permanen, kode barang 4010101001 NUP 1 sesuai dengan penjelasan pada Subbab Gedung dan Bangunan point (1).

Dengan adanya keseluruhan transaksi tersebut di atas, maka saldo akhir KDP per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0.-.

Laporan Realisasi Kinerja

I. Gambaran Umum Realisasi Kinerja

Pada urusan ekonomi, LKKPN Pekanbaru melaksanakan Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan serta Program Dukungan Manajemen. Program Pengelolaan Perikanan dan

Kelautan memiliki pagu sebesar Rp200.000.000 dengan realisasi Rp197.244.385 atau 98,62 persen. Program ini difokuskan pada kegiatan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya melalui penyusunan rekomendasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar. Output berupa rekomendasi kebijakan berhasil dicapai sepenuhnya dengan tingkat capaian 100 persen, menandakan bahwa seluruh target kinerja telah direalisasikan dan kegiatan telah diselesaikan sesuai rencana.

Program Dukungan Manajemen memiliki pagu anggaran sebesar Rp8.951.797.000 dengan realisasi Rp8.871.382.741 atau 99,1 persen. Program ini mendukung kelancaran operasional internal melalui layanan dukungan manajemen, layanan BMN, layanan organisasi dan tata kelola, layanan perkantoran, serta layanan manajemen kinerja internal. Seluruh indikator output pada program ini tercapai 100 persen, termasuk pengelolaan BMN, pelaksanaan tata kelola internal, monitoring pembangunan zona integritas, serta pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas dan kualitas pengelolaan organisasi, LKKPN Pekanbaru juga melaksanakan layanan manajemen kinerja internal dengan pagu sebesar Rp247.900.000 dan realisasi Rp246.187.820 atau 99,31 persen. Kegiatan ini meliputi layanan perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta manajemen keuangan. Seluruh output berupa dokumen perencanaan, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta review pengendalian intern atas pelaporan keuangan berhasil diselesaikan dengan capaian output 100 persen.

Pada urusan perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam, LKKPN Pekanbaru melaksanakan Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan pagu sebesar Rp15.772.948.000 dan realisasi Rp10.900.558.106 atau 69,11 persen. Program ini mencakup pengelolaan konservasi ekosistem dan biota perairan yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan strategis. Kegiatan perizinan produk konservasi biota perairan memiliki pagu Rp997.485.000 dengan realisasi Rp173.799.955 atau 17,42 persen. Meskipun penyerapan anggaran relatif rendah akibat efisiensi, seluruh target output berupa produk perizinan berhasil dicapai 100

persen. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian anggaran tidak menghambat pencapaian kinerja substantif.

Kegiatan kemitraan konservasi ekosistem direalisasikan sebesar Rp123.282.417 dari pagu Rp180.000.000 atau 68,49 persen. Dalam pelaksanaannya, LKKPN Pekanbaru berhasil menandatangani perjanjian kerja sama dengan tiga mitra, melampaui target awal, sehingga capaian output tetap tercatat 100 persen. Pada kegiatan penyediaan data dan informasi konservasi ekosistem dan biota perairan, pagu anggaran sebesar Rp2.520.007.000 dengan realisasi Rp708.963.322 atau 28,13 persen. Rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh efisiensi sehingga ruang lingkup kegiatan dipersempit. Namun demikian, output utama berupa dokumen data dan informasi konservasi tetap tercapai sepenuhnya, termasuk kegiatan monitoring penyu dan pemantauan terpadu di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas.

Dalam mendukung penyelenggaraan konservasi, LKKPN Pekanbaru mengelola kegiatan penyediaan sarana bidang kemaritiman, kelautan, dan perikanan dengan pagu Rp7.777.066.000 dan realisasi Rp7.083.789.472 atau 91,09 persen. Kegiatan ini mencakup pengadaan sarana pendukung pelayanan konservasi dan seluruh target output berhasil dicapai. Selain itu, kegiatan konservasi kawasan dan rehabilitasi ekosistem memiliki pagu Rp2.598.390.000 dengan realisasi Rp1.813.083.316 atau 69,78 persen. Output berupa kawasan konservasi perairan yang operasional secara kumulatif tercapai 100 persen, meskipun beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat efisiensi anggaran dan masih menunggu finalisasi laporan.

Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, LKKPN Pekanbaru melaksanakan kegiatan pelatihan bidang pertanian dan perikanan dengan pagu Rp1.700.000.000 dan realisasi Rp997.639.624 atau 58,68 persen. Kegiatan ini mencakup pelatihan bagi pengelola kawasan konservasi serta masyarakat pemanfaat kawasan konservasi. Seluruh target jumlah peserta pelatihan berhasil dipenuhi 100 persen, termasuk pelatihan selanjutnya, bimbingan teknis perencanaan pengelolaan kawasan konservasi, sertifikasi kompetensi, serta pelatihan pengembangan paket ekowisata kawasan konservasi.

Pada aspek penataan ruang laut, LKKPN Pekanbaru melaksanakan kegiatan rekomendasi kebijakan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut berisiko rendah dengan pagu Rp1.167.500.000 dan realisasi Rp1.071.169.234 atau 91,75 persen. Output berupa rekomendasi kebijakan berhasil dicapai sepenuhnya, didukung oleh kegiatan pelatihan dan sertifikasi remote pilot serta pengadaan peralatan pendukung perizinan dan pengendalian ruang laut.

II. Capaian Program dan Kegiatan

A. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Kode Program: HB)

Pada Tahun Anggaran 2025, Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru melaksanakan Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan pagu anggaran sebesar Rp200.000.000. Program ini direalisasikan sebesar Rp197.244.385 atau mencapai 98,62 persen. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode Kegiatan: 2365).

Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp197.244.385 dari pagu Rp200.000.000 atau sebesar 98,62 persen.

Output utama dari kegiatan ini adalah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Kode RO: 001). Target yang ditetapkan sebanyak 1 rekomendasi kebijakan dan seluruhnya berhasil direalisasikan dengan capaian 100 persen. Dengan demikian, meskipun terdapat selisih anggaran akibat efisiensi, kegiatan ini telah diselesaikan sepenuhnya sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan

B. Program Dukungan Manajemen (Kode Program: WA)

Program Dukungan Manajemen dilaksanakan untuk mendukung kelancaran operasional internal LKKPN Pekanbaru. Pada Tahun Anggaran 2025, program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp8.951.797.000 dengan

realisasi sebesar Rp8.871.382.741 atau mencapai 99,10 persen.

C. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Kode Kegiatan: 2367)

Kegiatan ini merupakan tulang punggung operasional organisasi yang mencakup berbagai layanan manajemen internal. Realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp8.871.382.741 dari pagu Rp8.951.797.000 atau sebesar 99,10 persen.

Output layanan yang dihasilkan antara lain Layanan Dukungan Manajemen Internal (Kode RO: EBA) dengan realisasi Rp8.625.194.921 dari pagu Rp8.703.897.000 atau sebesar 99,10 persen. Capaian output layanan ini mencapai 100 persen.

Selain itu, terdapat Layanan Barang Milik Negara (Kode RO: 956) dengan pagu Rp65.900.000 dan realisasi Rp65.842.205 atau 99,91 persen. Target sebanyak 7 layanan BMN berhasil direalisasikan seluruhnya, termasuk pelaksanaan lelang aset di Batam.

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Kode RO: 960) memiliki pagu Rp158.354.000 dengan realisasi Rp157.181.093 atau 99,26 persen. Output layanan ini mencapai 100 persen dan mencakup monitoring dokumen pembangunan Zona Integritas serta pelaksanaan tata laksana organisasi.

Selanjutnya, Layanan Perkantoran (Kode RO: 994) direalisasikan sebesar Rp8.402.171.623 dari pagu Rp8.479.643.000 atau mencapai 99,09 persen. Target sebanyak 2 layanan perkantoran berhasil dicapai 100 persen, yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

.

D. Layanan Manajemen Kinerja Internal (Kode RO: EBD)

Layanan Manajemen Kinerja Internal memiliki pagu anggaran sebesar Rp247.900.000 dengan realisasi Rp246.187.820 atau mencapai 99,31 persen. Output ini mencakup beberapa layanan pendukung akuntabilitas kinerja.

Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Kode RO: 952) direalisasikan sebesar Rp50.006.935 dari pagu Rp51.000.000 atau 98,05 persen, dengan target 2 dokumen yang seluruhnya tercapai, antara lain review pengusulan PNBPN Tahun 2026 bersama Inspektorat Mitra.

Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Kode RO: 953) memiliki pagu Rp132.000.000 dengan realisasi Rp131.559.986 atau 99,67 persen. Target sebanyak 5 dokumen berhasil dicapai 100 persen, termasuk pelaksanaan pleno hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Layanan Manajemen Keuangan (Kode RO: 955) direalisasikan sebesar Rp64.620.899 dari pagu Rp64.900.000 atau mencapai 99,57 persen. Target 4 dokumen berhasil dicapai 100 persen, meliputi review pengendalian intern atas pelaporan keuangan entitas pelaporan Ditjen PK dan Ditjen PRL Tahun 2025

IV. Program Kualitas Lingkungan Hidup (Kode Program: FD)

Program Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2025 memiliki pagu anggaran sebesar Rp15.772.948.000 dengan realisasi sebesar Rp10.900.558.106 atau mencapai 69,11 persen. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Kode Kegiatan: 2362).

V. Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan (Kode RO: PCA)

RO Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan memiliki pagu Rp997.485.000 dengan realisasi Rp173.799.955 atau sebesar 17,42 persen. Target sebanyak 3 produk perizinan berhasil dicapai 100 persen. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran, namun tidak berdampak pada pencapaian output.

VII. Kemitraan Konservasi Ekosistem (Kode RO: PEE)

RO Kemitraan Konservasi Ekosistem memiliki pagu Rp180.000.000 dengan realisasi Rp123.282.417 atau 68,49 persen. Output berupa kesepakatan kerja sama ditargetkan sebanyak 1 dokumen, namun realisasi menunjukkan

keberhasilan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan 3 mitra. Dengan demikian, capaian output tercatat 100 persen

VIII. Data dan Informasi Konservasi (Kode RO: QMA)

RO Data dan Informasi Publik memiliki pagu Rp2.520.007.000 dengan realisasi Rp708.963.322 atau 28,13 persen. Output dokumen data dan informasi konservasi ekosistem dan biota perairan seluruhnya tercapai 100 persen. Kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi monitoring penyu dan pemantauan terpadu di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas. Sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat efisiensi anggaran

IX. Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan (Kode RO: RAL)

RO Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan memiliki pagu anggaran sebesar Rp7.777.066.000 dengan realisasi Rp7.083.789.472 atau mencapai 91,09 persen. Output berupa 1 unit sarana pendukung penyelenggaraan konservasi berhasil direalisasikan sepenuhnya

X. Konservasi Kawasan dan Rehabilitasi Ekosistem (Kode RO: REA)

RO Konservasi Kawasan dan Rehabilitasi Ekosistem memiliki pagu Rp2.598.390.000 dengan realisasi Rp1.813.083.316 atau 69,78 persen. Target kawasan konservasi perairan yang operasional secara kumulatif seluas 1.302.586 hektar berhasil dicapai 100 persen. Beberapa kegiatan mengalami efisiensi anggaran dan masih menunggu finalisasi laporan

XI. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (Kode RO: SCC)

RO Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan memiliki pagu Rp1.700.000.000 dengan realisasi Rp997.639.624 atau 58,68 persen. Output peningkatan kompetensi pengelola kawasan konservasi ditargetkan sebanyak 40 orang dan berhasil direalisasikan sebanyak 48 orang. Selain itu, peningkatan kompetensi masyarakat pemanfaat kawasan konservasi ditargetkan sebanyak 15 orang dan seluruhnya tercapai. Kegiatan pelatihan meliputi pelatihan selam lanjutan,

bimbingan teknis perencanaan pengelolaan kawasan konservasi, sertifikasi kompetensi BNSP, serta pelatihan pengembangan paket ekowisata kawasan konservasi.

XII. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Kode Program: PBT)

Pada aspek penataan ruang laut, LKKPN Pekanbaru melaksanakan kegiatan Penataan Ruang Laut (Kode Kegiatan: 2366) dengan pagu anggaran sebesar Rp1.167.500.000 dan realisasi Rp1.071.169.234 atau mencapai 91,75 persen.

Output kegiatan ini adalah Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Berisiko Rendah (Kode RO: PBT). Target sebanyak 1 rekomendasi kebijakan berhasil direalisasikan 100 persen. Kegiatan pendukung meliputi pelatihan dan sertifikasi Remote Pilot Small UAS serta pengadaan peralatan pendukung perizinan dan pengendalian ruang laut. Seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan dan hanya menunggu finalisasi laporan serta serah terima hasil kegiatan

Laporan
Program
Prioritas
Nasional LKKPN
Pekanbaru

I. Ringkasan Umum Capaian Prioritas Nasional

Pelaksanaan anggaran Program Prioritas Nasional pada Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru sampai dengan *Audited* Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari dukungan terhadap pencapaian sasaran strategis pembangunan nasional di bidang pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penguatan tata kelola kawasan konservasi perairan.

Secara keseluruhan, alokasi pagu anggaran Program Prioritas Nasional pada LKKPN Pekanbaru sebesar Rp17.140.448.000, yang terdiri dari pagu efektif dan pagu yang masih diblokir. Sampai dengan *Audited*, realisasi anggaran telah mencapai Rp12.094.938.599, atau sekitar 70,57% dari total pagu, dengan sisa pagu sebesar Rp97.703.401 dan pagu blokir sebesar Rp4.947.806.000. Kegiatan ini mendukung prioritas nasional dalam bidang kelautan berkelanjutan dan ekonomi biru.

II. Deskripsi Per Program dan Kegiatan

A. Program Kualitas Lingkungan Hidup (Kode: FD)

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, yang bertujuan menjaga keberlanjutan ekosistem perairan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi nasional.

Rangkaian kegiatan dalam program ini meliputi:

- Perizinan Produk (PCA), yang mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya perairan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp173.799.955 dari pagu Rp997.485.000.
- Kegiatan Kemitraan (PEE), yang diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan realisasi Rp123.282.417 dari pagu Rp180.000.000.
- Penyediaan Data dan Informasi Publik (QMA), sebagai upaya meningkatkan transparansi dan ketersediaan data konservasi, dengan realisasi Rp634.930.196 dari total pagu Rp2.520.007.000.
- Penyediaan Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan (RAL), yang mendukung operasional pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi, dengan realisasi sangat optimal sebesar Rp7.083.789.472 dari pagu Rp7.777.066.000.
- Konservasi Kawasan dan Rehabilitasi Ekosistem (REA), yang berfokus pada perlindungan dan pemulihan ekosistem perairan, dengan realisasi Rp1.813.083.316 dari pagu Rp2.598.390.000.
- Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (SCC), yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan konservasi, dengan realisasi Rp997.639.624 dari pagu Rp1.700.000.000
- Pelaksanaan kegiatan pada program ini menunjukkan bahwa sebagian besar output telah tercapai sesuai rencana kerja, sementara sisa pagu dan pagu blokir akan menjadi

dasar penyesuaian pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya sesuai ketentuan penganggaran yang berlaku

B. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Kode: HB)

Program ini mendukung Prioritas Nasional melalui penguatan kebijakan dan tata kelola wilayah pesisir serta penataan ruang laut.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui kegiatan Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (PBW), dengan realisasi anggaran sebesar Rp197.244.385 dari pagu Rp200.000.000.
- Penataan Ruang Laut melalui kegiatan Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan (PBT), yang mendukung sinkronisasi kebijakan tata ruang laut nasional dan daerah, dengan realisasi Rp1.071.169.234 dari pagu Rp1.167.500.000.

Realisasi pada program ini menunjukkan tingkat serapan anggaran yang tinggi dan mencerminkan efektivitas perencanaan serta pelaksanaan kegiatan kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan

III. Analisis Umum

Kesimpulan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Anggaran Secara umum, pelaksanaan anggaran Program Prioritas Nasional pada LKKPN Pekanbaru sampai dengan *Audited* Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, serta mendukung pencapaian target kinerja nasional.

Sisa pagu dan pagu yang masih diblokir akan dikelola dan ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan penganggaran pemerintah pusat, serta menjadi bagian dari evaluasi dan perencanaan kegiatan pada periode berikutnya. Dengan demikian, pengelolaan keuangan atas Program Prioritas Nasional ini dapat dipertanggungjawabkan secara memadai dan transparan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi anggaran Program Prioritas Nasional sampai dengan *Audited* Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa masukan yang menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program ke depan.

Pertama, secara umum tingkat serapan anggaran menunjukkan kinerja yang cukup baik, khususnya pada kegiatan yang bersifat operasional dan penyediaan sarana prasarana, seperti kegiatan penyediaan sarana bidang kemaritiman, konservasi kawasan, serta kebijakan penataan ruang laut. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan telah disusun secara realistis dan pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana kerja.

Kedua, masih terdapat pagu anggaran yang diblokir hingga *Audited* dengan nilai yang relatif signifikan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian output Program Prioritas Nasional, khususnya pada kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran lanjutan untuk penyediaan data, penguatan kemitraan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Ketiga, pada beberapa kegiatan non-fisik seperti penyediaan data dan informasi publik serta kegiatan kemitraan, realisasi anggaran belum sepenuhnya mencapai pagu yang tersedia. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta perlunya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah yang lebih intensif.

Keempat, dari sisi pengelolaan administrasi keuangan, seluruh realisasi belanja telah didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang sah dan dicatat berdasarkan basis SP2D, sehingga secara akuntansi telah mencerminkan transaksi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pada periode laporan telah terjadi transaksi resiprokal antara Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (477456) dengan Satker 087.01.418934 dengan

jenis transaksi belanja jasa lainnya (522191) sesuai nomor SP2D 250081313104662 tanggal 28 Mei 2025 dan nomor dokumen transaksi 1/BLJ/4774562025 tanggal 4 Juni 2025 dengan total anggaran Rp6.560.000,- untuk kegiatan diklat fungsional arsiparis keterampilan angkatan I tanggal 6 Mei sampai dengan 3 Juni 2025 an. Amaroh, A.Md.

2. Pada TW.III telah dilakukan transaksi perubahan kondisi dan pencatatan henti guna atas 24 unit BMN berdasarkan Surat Keterangan nomor B.1255/LKKPN/KP.120/IX/2025 tanggal 29 Desember 2025, dikarenakan terjadinya *force majeure* atas BMN tersebut sesuai dengan Surat Laporan Kronologis Nomor: B.1196/LKKPN/TU.140/IX/2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Laporan Kronologis BMN Berupa Kapal Yang diBakar.
3. Informasi Penting Lainnya

Selama periode *Audited* tahun 2025, LKKPN Pekanbaru banyak mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi reorganisasi dimana sekarang LKKPN meliputi :

- a. Terjadi pergantian Kepala LKKPN Pekanbaru dari semula dipimpin oleh Dr.Rahmat Irfansyah, M.Si dan digantikan oleh Rahmad Hidayat, S.Hut, M.Si sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/MEN-SJ/KP.431/VII/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 7 Juli 2025.
- b. Telah terjadi kejadian luar biasa terhadap Barang Milik Negara LKKPN Pekanbaru berupa Kapal Pengawas Perikanan *Spinner Dolphin* yakni telah terjadinya pembakaran oleh masyarakat pada tanggal 12 Desember 2025 sesuai dengan surat nomor B.1196/LKKPN/TU.140/IX/2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Laporan Kronologis BMN Berupa Kapal yang dibakar. Sehingga dari kejadian tersebut Telah dilakukan transaksi perubahan kondisi dan pencatatan henti guna atas 24 unit BMN berdasarkan Surat Keterangan nomor B.1255/LKKPN/KP.120/IX/2025

tanggal 29 Desember 2025, dikarenakan terjadinya *force majeure* atas BMN tersebut.

- c. Transaksi Transfer Keluar 1 unit Note Book NUP 67 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara berupa Note Book antara LKKPN Pekanbaru dengan BPSPL Padang nomor B.940/LKKPN/PL.450/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 berupa note book dengan nilai Rp24.500.000,-
 - d. Sampai priode pelaporan Tahunan tahun 2025 telah LKKPN Pekanbaru telah melakukan revisi RKAKL sebanyak 17 kali. Secara rinci disajikan pada penjelasan atas pos-pos laporan realisasi anggaran.
4. Pada Tahun Anggaran 2025, LKKPN Pekanbaru memperoleh penambahan pagu anggaran bersumber dari PNPB sehingga total pagu meningkat dari Rp15.999.146.000 menjadi Rp26.490.602.000, atau bertambah sebesar Rp10.491.456.000 sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L cetak tanggal 30 Oktober 2025. Penambahan ini merupakan hasil pengusulan tambahan penggunaan PNPB yang diajukan sejak Agustus 2025 untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana, penguatan pelayanan publik, serta dukungan kegiatan teknis konservasi.
- Tambahan anggaran tersebut menuntut percepatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV, termasuk penyesuaian RPD, finalisasi dokumen pengadaan, dan percepatan penetapan Maksimum Pencairan (MP). Meskipun memerlukan percepatan realisasi, penambahan pagu ini memberikan ruang lebih besar bagi LKKPN Pekanbaru untuk meningkatkan kualitas layanan, efektivitas program, serta pencapaian target kinerja pada akhir tahun 2025.

Lampiran I: Rincian Kegiatan Program Prioritas Nasional

Uraian Kegiatan Prioritas Nasional LKKPN Pekanbaru

KODE PROGRA M	URAIAN PROGRAM	KODE KEGIATA N	URAIAN KEGIATAN	KODE KRO	URAIAN KRO	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	BLOKIR PAGU	PAGU TOTAL (PAGU + BLOKIR)
FD	PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	2362	PENGELOLAAN KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN	PCA	PERIZINAN PRODUK	173.910.000	173.799.955	110.045	823.575.000	997.485.000
FD	PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	2362	PENGELOLAAN KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN	PEE	KEMITRAAN	124.050.000	123.282.417	767.583	55.950.000	180.000.000
FD	PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	2362	PENGELOLAAN KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN	QMA	DATA DAN INFORMASI PUBLIK	709.302.000	634.930.196	74.371.804	1.810.705.000	2.520.007.000
FD	PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	2362	PENGELOLAAN KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN	RAL	SARANA BIDANG KEMARITIMAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	7.090.566.000	7.083.789.472	6.776.528	686.500.000	7.777.066.000
FD	PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	2362	PENGELOLAAN KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN	REA	KONSERVASI KAWASAN/REHABILITASI EKOSISTEM	1.817.684.000	1.813.083.316	4.600.684	780.706.000	2.598.390.000
FD	PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	2362	PENGELOLAAN KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN	SCC	PELATIHAN BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.000.000.000	997.639.624	2.360.376	700.000.000	1.700.000.000
HB	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN	2365	PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PBW	KEBIJAKAN BIDANG KEMARITIMAN DAN KELAUTAN	200.000.000	197.244.385	2.755.615	-	200.000.000
HB	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN	2366	PENATAAN RUANG LAUT	PBT	KEBIJAKAN BIDANG RUANG DAN PERTANAHAN	1.077.130.000	1.071.169.234	5.960.766	90.370.000	1.167.500.000
TOTAL						12.192.642.000	12.094.938.599	97.703.401	4.947.806.000	17.140.448.000

Pekanbaru, 8 Desember 2025
Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru,

Rahmad Hidayat

**Lampiran 2: Laporan Capaian Output Satker LKKPN Pekanbaru
2025**

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2025

Periode s.d bulan : 2025-12
Kementerian Negara/Lembaga : 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Eselon 1 : 032.07 - DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Wilayah/Provinsi : 09.51 - KOTA PEKANBARU/RIAU
Satuan Kerja : 477456 - LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU

Halaman : 1
Tanggal Cetak : 07-01-2026

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
04	EKONOMI	9,151,797,000.00	9,068,627,126.00	99.09%							
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	9,151,797,000.00	9,068,627,126.00	99.09%							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	200,000,000.00	197,244,385.00	98.62%							
2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200,000,000.00	197,244,385.00	98.62%							
PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	200,000,000.00	197,244,385.00	98.62%							
001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	200,000,000.00	197,244,385.00	98.62%	1.0000	Rekomendasi Kebijakan	1.0000	100%	1.38%	(00)	kegiatan telah selesai dilaksanakan
WA	Program Dukungan Manajemen	8,951,797,000.00	8,871,382,741.00	99.1%							
2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	8,951,797,000.00	8,871,382,741.00	99.1%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,703,897,000.00	8,625,194,921.00	99.1%							
956	Layanan BMN	65,900,000.00	65,842,205.00	99.91%	7.0000	Layanan	7.0000	100%	0.09%	(00)	lelang aset di Batam
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	158,354,000.00	157,181,093.00	99.26%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	0.74%	(00)	-Monitoring dokumen Pembangunan Zona Integritas -Pelaksanaan tata laksana
994	Layanan Perkantoran	8,479,643,000.00	8,402,171,623.00	99.09%	2.0000	Layanan	2.0000	100%	0.91%	(00)	Gaji dan Tunjangan Pegawai

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	247,900,000.00	246,187,820.00	99.31%							
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	51,000,000.00	50,006,935.00	98.05%	2.0000	Dokumen	2.0000	100%	1.95%	(00)	Review pengusulan PNPB 2026 bersama inspektorat mitra
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	132,000,000.00	131,559,986.00	99.67%	5.0000	Dokumen	5.0000	100%	0.33%	(00)	Pleno Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan
955	Layanan Manajemen Keuangan	64,900,000.00	64,620,899.00	99.57%	4.0000	Dokumen	4.0000	100%	0.43%	(00)	Review Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Entitas Pelaporan Ditjen PK dan Ditjen PRL Tahun 2025
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	16,940,448,000.00	11,971,727,340.00	70.67%							
04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	16,940,448,000.00	11,971,727,340.00	70.67%							
FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	15,772,948,000.00	10,900,558,106.00	69.11%							
2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	15,772,948,000.00	10,900,558,106.00	69.11%							
PCA	Perizinan Produk	997,485,000.00	173,799,955.00	17.42%							
002	Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	997,485,000.00	173,799,955.00	17.42%	3.0000	Produk	3.0000	100%	82.58%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	kegiatan telah selesai dilaksanakan. Persentase penyerapan anggaran rendah disebabkan oleh sebagian besar anggaran mengalami efisiensi
PEE	Kemitraan	180,000,000.00	123,282,417.00	68.49%							
001	Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	180,000,000.00	123,282,417.00	68.49%	1.0000	Kesepakatan	3.0000	100%	31.51%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	kegiatan telah selesai dilaksanakan. capaian tahun 2025 LKKPN Pekanbaru berhasil melaksanakan Penandatanganan PERjanjian Kerjasama dengan 3 mitra
QMA	Data dan Informasi Publik	2,520,007,000.00	708,963,322.00	28.13%							
001	Data dan Informasi Konservasi Ekosistem	2,170,007,000.00	708,963,322.00	32.67%	2.0000	Dokumen	2.0000	100%	67.33%	(07) Output telah tercapai, hanya menunggu finalisasi laporan/serah terima	disebabkan efisiensi anggaran, pada RO ini hanya dapat melaksanakan kegiatan Monitoring Penyu dan Pemantauan Terpadu di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas
002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	350,000,000.00	0.00	0%	1.0000	Dokumen	1.0000	100%	100%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat efisiensi anggaran
RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	7,777,066,000.00	7,083,789,472.00	91.09%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	7,777,066,000.00	7,083,789,472.00	91.09%	1.0000	Unit	1.0000	100%	8.91%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Pengadaan sara pendukung pelayanan konservasi
REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	2,598,390,000.00	1,813,083,316.00	69.78%							
002	Kawasan Konservasi Perairan yang Operasional (kumulatif)	2,598,390,000.00	1,813,083,316.00	69.78%	1,302,586.0000	Hektar	1,302,586.0000	100%	30.22%	(07) Output telah tercapai, hanya menunggu finalisasi laporan/serah terima	Kegiatan telah selesai dilaksanakan namun terdapat beberapa kegiatan mengalami efisiensi anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan
SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	1,700,000,000.00	997,639,624.00	58.68%							
001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya	1,100,000,000.00	699,201,472.00	63.56%	40.0000	Orang	48.0000	100%	36.44%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	-Pelatihan Selam Lanjutan -Bimtek Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Uji Kompetensi BNSP Skema Sertifikasi Ahli (Level 7) -Internalisasi Layanan Perijinan
002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	600,000,000.00	298,438,152.00	49.74%	15.0000	Orang	15.0000	100%	50.26%	(07) Output telah tercapai, hanya menunggu finalisasi laporan/serah terima	-Pelatihan Bimbingan Teknis Pembuatan Paket Ekowisata Kawasan Konservasi
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1,167,500,000.00	1,071,169,234.00	91.75%							
2366	Penataan Ruang Laut	1,167,500,000.00	1,071,169,234.00	91.75%							
PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	1,167,500,000.00	1,071,169,234.00	91.75%							
009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	1,167,500,000.00	1,071,169,234.00	91.75%	1.0000	Rekomendasi Kebijakan	1.0000	100%	8.25%	(07) Output telah tercapai, hanya menunggu finalisasi laporan/serah terima	-Pelatihan dan Sertifikasi Remote Pilot Small UAS -Pengadaan Peralatan Pendukung Perizinan dan Pengendalian Ruang Laut